

**LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH**

**PENETAPAN TENAGA KERJA DI BIDANG AKUNTANSI DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DI BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDES) CAKRA USAHA DESA TAPAN
KECAMATAN KEDUNGGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Oleh

Nadila Hananingrum

NIM. 12403183218

Dosen Pembimbing Lapangan: Sri Dwi Estiningrum, S.E., Ak., M.M. C.A.

NIP. 19720908 200710 2 001

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung ini telah disetujui dan disahkan pada:

Hari: Jum'at
Tanggal: 27 Agustus 2021
Di: Tulungagung
Judul Laporan: Penetapan Tenaga Kerja Di Bidang Akuntansi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Di Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) Cakra Usaha Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

MENYETUJUI
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN



Sri Dwi Estiningrum,S.E.,Ak., MM., C.A.

NIP. 19720908 200710 2 001

MENGESAHKAN
a.n. DEKAN
KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Siswahyudianto, M.M.

NIP. 2015068402

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya dan sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan yang berjudul “PENETAPAN TENAGA KERJA DI BIDANG AKUNTANSI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) CAKRA USAHA” tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan ini dapat selesai. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
2. Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
3. Dr. Qomarul Huda, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
4. Siswahyudianto, M.M., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
5. Sri Dwi Estiningrum, S.E., Ak.CA.M.M., selaku Dosen Pembimbing Lapangan.
6. Bapak Moh. Khoirul Huda, selaku Ketua BUMDes Cakra Usaha.
7. Ibu Mia Fira Saputri, selaku Bendahara BUMDes Cakra Usaha.
8. Seluruh staf dan pengurus di BUMDes Cakra Usaha.
9. Ibu dan bapak serta adik serta teman-teman yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan ini.
10. Teman-teman dan semua pihak yang membantu kelancaran Laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan ini.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya Laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan ini berguna bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Tulungagung, 13 Agustus 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nadila Hananingrum', written over a circular stamp that contains the number '11'.

Nadila Hananingrum

NIM. 12403183218

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan	4
1. Tujuan.....	4
2. Kegunaan.....	5
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	6
1. Waktu Pelaksanaan.....	6
2. Tempat Pelaksanaan	6
BAB IPELAKSANAAN PRAKTIK	7
A. Profil Lembaga.....	7
1. Sejarah BUMDes Cakra Usaha	7
2. Letak Geografis	8
3. Tujuan BUMDes Cakra Usaha.....	8
4. Visi dan Misi BUMDes Cakra Usaha	9
5. Struktur Organisasi BUMDes Cakra Usaha	9
6. <i>Job Description</i> Kepengurusan BUMDes Cakra Usaha	10
B. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan	11
C. Permasalahan di Lapangan.....	12
D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik	13
BAB IIPEMBAHASAN	15
A. Kualitas Pelaporan Keuangan	15

1.	Pengertian Kualitas Pelaporan Keuangan	15
2.	Tujuan Pelaporan Keuangan.....	16
B.	Pengendalian Internal.....	16
1.	Pengertian Pengendalian Internal	16
2.	Prosedur dan Tujuan Pengendalian Internal.....	18
3.	Unsur-unsur Pengendalian Internal	18
4.	Prinsip-Prinsip Pengendalian Internal	20
5.	Keterbatasan Pengendalian Internal	21
C.	Analisis Temuan Studi	23
1.	Unit-Unit Usaha BUMDes Cakra Usaha.....	23
2.	Tugas-Tugas Pencatatan Akuntansi pada Unit-Unit di BUMDes Cakra Usaha	25
3.	Tugas dan Tanggungjawab Bendahara BUMDes	26
C.	Solusi Permasalahan.....	28
BAB IV	PENUTUP	29
A.	Kesimpulan	29
B.	Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA		32
LAMPIRAN-LAMPIRAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN.....		34

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Desa dapat dikatakan sebagai hasil dari kombinasi antara kegiatan suatu kelompok manusia dan lingkungannya. Hasil dari kombinasi itu adalah perwujudan di bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, dan kultural yang saling berikatan satu sama lain dan hubungan dengan daerah (R. Bintarto, 2010).¹ Indonesia merupakan wilayah yang dibangun dengan menyatukan ribuan desa dan bergantung dari desa. Desa menjadi garda utama dan poros penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Konsep pembangunan digambarkan dimulai dari pembangunan akarnya, penggambaran akar yang dimaksud adalah desa sebagai lembaga pemerintahan terkecil dan lembaga pemerintahan yang memiliki kedekatan secara langsung dengan masyarakat. Hal tersebut menegaskan bahwa pemikiran tentang pembangunan suatu wilayah dimulai dari desa sebagai penopang pembangunan baik tingkat daerah maupun nasional. Namun kenyataan berbanding terbalik, desa di Indonesia masih banyak yang merupakan desa tertinggal. Dengan kondisi desa yang tertinggal akan menghambat pembangunan desa dan peningkatan ekonomi masyarakat. Potensi alam desa dapat dijadikan potensi yang besar untuk mendorong peningkatan perekonomian secara nasional. Selain itu segenap sumber daya manusia yang dimiliki desa merupakan potensi yang dijadikan modal dasar bagi berlangsungnya perkembangan desa. Potensi sumber daya dan sumber daya manusia merupakan gabungan sempurna modal dasar perkembangan desa. Potensi fisik suatu desa meliputi faktor-faktor antara lain: tanah sebagai mata pencaharian dari hasil tambang serta pertanian; air sebagai hal pokok kepentingan hidup manusia; iklim yang di dalamnya termasuk suhu udara yang mempengaruhi usaha pertanian dan daerah wisata; dan

¹ R. Bintarto, *Desa Kota*, (Bandung: Alumni, 2010), Hal. 6.

manusia sebagai tenaga kerja yang mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam.

Salah satu cara melakukan percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan perekonomian desa dengan dikembangkannya Badan Usaha Milik Desa. BUMDes merupakan pendekatan baru yang dilakukan pemerintah pusat untuk mampu menggerakkan dan merangsang perekonomian di pedesaan yang dikembangkan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pendekatan ini merupakan cara baru karena pendekatan sebelumnya belum mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga dalam bidang pengelolaan aset-aset desa dan sumberdaya ekonomi yang terdapat di desa (Dewi, 2014).² BUMDes didirikan dengan tujuan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang membuka usaha, menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa, untuk mengembangkan desa, dan meningkatkan jumlah pendapatan asli desa. Jika BUMDes dikelola dengan baik, maka desa akan secara mandiri membiayai pembangunan desa dan desa mampu mengentaskan kemiskinan dengan memberikan wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan BUMDes dipergunakan dengan baik untuk memanfaatkan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa melalui undang-undang yang telah diterbitkan. Kewenangan ini diberikan untuk melakukan suatu inovasi dalam membangun desa.

Laporan keuangan secara umum adalah hasil dari proses akuntansi yang berfungsi untuk memberikan informasi data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (Hery, 2015).³ BUMDes juga membutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat

² Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, *Journal of Rural and Development*, Vol. 5 No.1, 1 Febuari 2014, Hal. 2.

³ Hery, *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*, (Jakarta: PT. Buku Seru, 2015), Hal.3.

keputusan dan mengkaji ulang keputusan mengenai alokasi sumber daya (Nurlan, 2008).⁴ Secara umum sistem pelaporan keuangan BUMDes tidak berbeda dengan lembaga lainnya. BUMDes harus melakukan pencatatan secara berurutan dengan bahasa yang mudah dipahami. Alasan pelaporan keuangan BUMDes disajikan seperti itu karena laporan ini akan dikaji oleh beberapa pihak yang mungkin saja tidak memahami pelaporan keuangan yang lebih kompleks. Cakupan pelaporan keuangan lebih luas dibandingkan laporan keuangan, tidak hanya laporan keuangan namun juga media pelaporan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Laporan keuangan sangat berarti dalam proses pengambilan keputusan, para pengguna laporan keuangan menuntut diberikan informasi yang berkualitas dan andal. Menurut Wiley (2015) “kualitas pelaporan keuangan yang tinggi ditunjukkan dengan *completeness, unbiased measurement, dan clear presentation*”.⁵

Akuntansi BUMDes saat ini mengambil banyak perhatian. Pelaksanaan akuntansi BUMDes akan mudah dikerjakan jika pencatatan akuntansi sudah dilakukan saat pembentukan BUMDes. Permasalahan yang terjadi pada BUMDes terkait pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban dialami BUMDes saat telah memiliki unit usaha adalah mengolah data dalam akuntansi BUMDes. Untuk membuat laporan keuangan BUMDes harus diketahui akuntansi BUMDes yang sesuai. Jenis akuntansi BUMDes antara lain akuntansi perdagangan untuk usaha dagang (contoh: penjualan alat tulis), akuntansi manufaktur untuk usaha di bidang manufaktur, dan akuntansi jasa untuk usaha jasa (contohnya penyewaan gor). BUMDes menemui kendala terkait penyelenggaraan akuntansi, kendala pertama terkait jenis usaha yang beraneka ragam. Sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dalam berbagai jenis usaha.

Setiap organisasi wajib memiliki pengendalian internal dikarenakan berbagai hal. Salah satunya untuk kelancaran operasional

⁴ D. Nurlan, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: PT. Indeks, ed.1, 2008), Hal.52.

⁵ Wiley, *Level II CFA Study Guide*, (New Jersey: John Wiley and Sons Inc, 2015), Hal.271.

sampai dengan masalah tingkat keamanan. Pengendalian internal berperan dalam pencegahan dan deteksi kecurangan (fraud) dan melindungi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Tenaga kerja adalah orang-orang yang bersedia dan sanggup melakukan pekerjaan, dan dalam golongan ini meliputi orang-orang yang bekerja untuk diri sendiri, keluarga yang menerima gaji maupun orang-orang yang bekerja untuk menerima gaji (Djojohadikusumo, 1985).⁶ Yang termasuk tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang bersiap melakukan pekerjaan, meliputi yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan, pelajar, dan yang mengurus rumah. Dalam BUMDes dibutuhkan tenaga kerja dalam pengelolaan dan pelaksana operasional BUMDes. Bendahara BUMDes memiliki beberapa tanggung jawab yang diemban selaku pembuat laporan keuangan dan pelaksana operasional. Dibutuhkan pengendalian internal yang memadai untuk memberikan tanggungjawab dan pemisahan tugas yang jelas agar tidak terjadi beban berlebih. Beban kerja berlebih ini akan ikut mempengaruhi kualitas dari pelaporan keuangan yang dihasilkan. Diperlukan ketaatan terhadap berlakunya pengendalian internal dalam sebuah organisasi.

Berdasarkan dasar pemikiran diatas, penulis tertarik untuk menganalisa permasalahan berkaitan dengan tenaga kerja di bagian akuntansi BUMDes dengan melakukan penelitian dengan judul Penetapan Tenaga Kerja di Bidang Akuntansi dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan di BUMDes Cakra Usaha.

B. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dilakukannya Praktik Pengalaman Lapangan pada mahasiswa Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung adalah:

⁶ Sumitro Djojohadikusumo, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1985), Hal. 70.

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penetapan Tenaga Kerja di Bidang Akuntansi dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cakra Usaha Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada Lembaga pemerintah desa Tapan yakni BUMDes Cakra Usaha dan bagaimana penanganan permasalahan tersebut.
- c. Untuk mengetahui adanya kesenjangan permasalahan yang terjadi di lapangan dan teori yang dipelajari.

2. Kegunaan

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung untuk menambah pengetahuan mengenai penetapan tenaga kerja di bidang akuntansi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

- b. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cakra Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang bermanfaat untuk memajukan BUMDes Cakra Usaha. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi mengenai penetapan tenaga kerja di bidang akuntansi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

- c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat membantu mahasiswa mengetahui kondisi dunia kerja khususnya lembaga keuangan pada tingkat pemerintahan desa BUMDes Cakra Usaha. Selain itu penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penetapan tenaga kerja di bidang akuntansi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di BUMDes cakra usaha. Penelitian ini juga sebagai syarat dalam memenuhi tugas akhir Praktik Pengalaman Lapangan.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti penetapan tenaga kerja di bidang akuntansi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di BUMDes cakra usaha.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan Gelombang II Tahun 2021 Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan kurang lebih 33 hari.

2. Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan yaitu di BUMDes Cakra Usaha yang bertempat di Jalan Jayeng Kusuma No. 1/42, RT.01/RW.03 Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTIK

A. Profil Lembaga

1. Sejarah BUMDes Cakra Usaha

BUMDes Cakra Usaha yang terletak di Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung berdiri pada tanggal 29 Januari 2015. BUMDes Cakra Usaha pada tahun 2016 sempat mengalami perubahan. Pendirian BUMDes Cakra Usaha berdasarkan Peraturan Desa Tapan No. 01 Tahun 2015 dan selanjutnya berubah berdasarkan Peraturan Desa Tapan No. 06 Tahun 2016. Pendirian BUMDes Cakra Usaha dilatarbelakangi oleh adanya pertemuan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat di desa Tapan. Dalam pertemuan ini dilakukan musyawarah desa yang melihat kondisi keuangan desa dan pemasukan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa yang masih tergolong rendah. Pada pertemuan ini juga dibahas mengenai potensi di desa Tapan yang dinilai cukup memadai untuk membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Maka terjadilah kesepakatan antara tokoh masyarakat dan pemerintah desa Tapan untuk membentuk suatu lembaga yang dikelola oleh desa. Lembaga ini sebagai wadah untuk mengelola aset desa, jasa pelayanan dan usaha lainnya.

Peresmian BUMDes Cakra Usaha dilakukan secara langsung oleh Kepala Desa yang menjabat saat itu yakni Bapak Mugiyono. Peresmian BUMDes Cakra Usaha juga didampingi oleh beberapa elemen pada tingkat desa yakni BPD, Beberapa tokoh pemerintah desa, Para Ketua RT dan Ketua RW, LPMD, dan tokoh masyarakat lain. Pada awal pendirian BUMDes Cakra Usaha memiliki dana sebesar Rp. 65.553.075 sebagai modal awal. Modal awal ini bersumber dari dana bantuan yang diberikan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Dana bantuan ini merupakan bagian dari program yang diusung pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diberi nama program GERDU TASKIN atau Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.

BUMDesCakra Usaha kemudian dapat mengembangkan permodalannya dan saat ini memiliki beberapa unit usaha yakni, Unit Usaha Simpan Pinjam (UPK), Unit Jasa (Agen BRILink dan penyewaan gor), Unit Perdagangan (Fotocopy), Unit Pertanian dan Unit Perikanan.

2. Letak Geografis

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cakra Usaha didirikan dengan maksud mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. BUMDes Cakra Usaha sendiri terletak di Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Tepatnya beralamat di jalan Jayeng Kusuma No. 1/42, RT.01/RW.03. BUMDes Cakra Usaha terbilang cukup strategis karena bersebelah dengan kantor desa Tapan dan berada di jalan utama masuk desa Tapan. Jarak desa Tapan menuju pusat kota Tulungagung adalah 2,5 km yang terbilang cukup dekat dari pusat kota. Sehingga akses menuju desa Tapan tidak terlalu sulit. Luas wilayah desa Tapan adalah 2,41 km² dan mencakup 8.17% wilayah kecamatan Kedungwaru.

Secara umum cuaca di desa Tapan terbilang cukup sejuk dengan suhu berkisar antara 21° sampai dengan 29°. Sehingga di pagi maupun siang hari sangat cocok untuk bersantai di taman, karena cuaca tidak terlalu panas. Sehingga di desa Tapan terdapat beberapa taman di antaranya taman asoka dan taman cemara. Taman ini akan dijadikan wisata dan dikelola BUMDes, namun masih dalam tahap perencanaan. Rencananya taman ini akan mulai dikelola tahun 2022, jika tidak terdapat kendala.

3. Tujuan BUMDes Cakra Usaha

Tujuan pembentukan BUMDes Cakra Usaha adalah:

- a. Tujuan umum pembentukan BUMDes adalah untuk mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

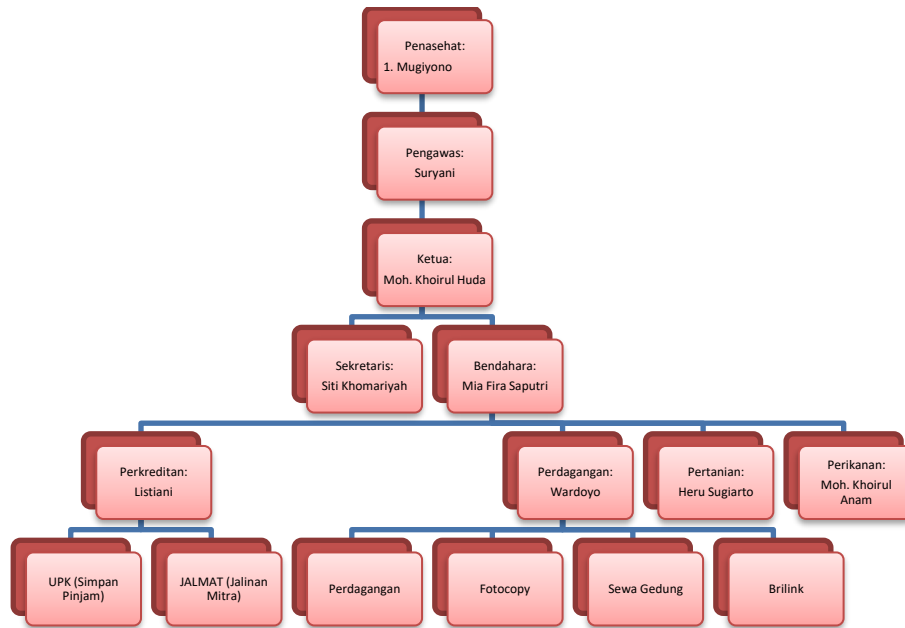
- b. Tujuan khusus pembentukan BUMDes adalah:
 - i) Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
 - ii) Meningkatkan potensi usaha yang ada di desa.
 - iii) Untuk membuka lapangan pekerjaan baru.
 - iv) Untuk memperlancar transaksi dan perputaran ekonomi di desa.

4. Visi dan Misi BUMDes Cakra Usaha

- a. Visi BUMDes Cakra Usaha
 - i) Terwujudnya BUMDes Cakra Usaha yang memiliki sifat mandiri dan memiliki karakter.
- b. Misi BUMDes Cakra Usaha
 - i) Mengembangkan jaringan kerjasama di bidang ekonomi antara berbagai pihak dan pihak BUMDes mewakili pemerintah desa
 - ii) Membangun infrastruktur dasar di desa Tapan yang nantinya akan mendukung perekonomian masyarakat desa
 - iii) Mengembangkan perekonomian melalui usaha di sektor riil
 - iv) Mengelola dana yang masuk ke desa yang bersumber dari program Gerdu Taskin yang merupakan dana yang bersifat bergulir dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi di desa Tapan.

5. Struktur Organisasi BUMDes Cakra Usaha

Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cakra Usaha terdapat susunan organisasi yang terdiri dari Penasehat, Pengurus, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala unit usaha. Penasehat BUMDes adalah Kepala Desanya sendiri yakni bapak Mugiyono.



6. Job Description Kepengurusan BUMDes Cakra Usaha

a. Penasehat

- i) Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional BUMDes Cakra Usaha dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes.
- ii) Memberikan saran dan masukan mengenai permasalahan yang terjadi di BUMDes Cakra Usaha.
- iii) Mengendalikan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

b. Pengawas

- i) Melakukan pengawasan dan memberikan evaluasi pelaksanaan kinerja operasional.
- ii) Melakukan penetapan kebijakan untuk pengembangan kegiatan usaha BUMDes.

c. Ketua

- i) Sebagai pelaksana dalam operasional untuk mengelola BUMDes.
- ii) Sebagai koordinator dalam mengelola BUMDes.

d. Sekretaris

- i) Sebagai koordinator dalam bidang administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.

- ii) Sebagai pengendalian manajemen pelayanan harian.
 - iii) Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa.
 - iv) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
 - v) Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan.
- e. Bendahara
- i) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan.
 - ii) Membuat laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan.
 - iii) Sebagai pengendali laporan keuangan.
 - iv) Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa.

B. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) gelombang II dilaksanakan mulai tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021. Tempat pelaksanaan PPL di BUMDes Cakra Usaha yang berlokasi di desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan dilaksanakan secara mandiri di desa masing-masing sebagai akibat dari adanya virus corona yang terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan gelombang II hanya dapat dilaksanakan dengan metode wawancara dan observasi. Dalam proses wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yakni wawancara langsung dan wawancara tidak langsung secara daring melalui telepon atau via *whatsapp*. Pelaksanaan wawancara langsung dilakukan apabila kondisi di daerah tempat pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan tidak mengalami *lockdown* atau penutupan

sementara. Sebagai akibat dari adanya pandemi ini Praktik Pengalaman Lapangan dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan serta dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan terus berada di lokasi PPL.

Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan observasi aktivitas dan kegiatan yang dilakukan BUMDes.
2. Pada wawancara pertama narasumbernya adalah ketua BUMDes Tapan yakni Khoirul Huda. Pada wawancara ini diperoleh informasi mengenai profil lembaga dan mencari tahu permasalahan yang terjadi di lembaga Praktik Pengalaman Lapangan.
3. Wawancara narasumber wawancara kedua adalah Bendahara yaitu Mia Fira Saputri. Pada wawancara ini saya berusaha mencari tahu permasalahan yang terkait dengan bidang akuntansi yang terjadi BUMDes.
4. Pada wawancara dan observasi terakhir dilaksanakan dengan narasumber Ketua Unit Perkreditan dan Bendahara BUMDes yaitu Listiani dan Mia. Dalam wawancara terakhir ini informasi yang digali mengenai penetapan tenaga kerja di bidang akuntansi.
5. Melakukan dokumentasi BUMDes dan beberapa unit yang terdapat di BUMDes berupa foto dan video.

C. Permasalahan di Lapangan

Terdapat beberapa permasalahan yang penulis temukan selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan di BUMDes Cakra Usaha. Permasalahan yang pertama terkait dengan penetapan beban kerja bendahara selaku pegawai bagian akuntansi, yaitu keseluruhan pelaporan keuangan BUMDes Cakra Usaha termasuk pelaporan harian setiap unit dikerjakan oleh bendahara BUMDes. Di BUMDes Cakra Usaha sendiri memiliki empat unit usaha yang memiliki pencatatan terpisah setiap masing-masing unit usaha. Unit usaha pada BUMDes Cakra Usaha antara lain: unit usaha Pengkreditan, unit usaha Perdagangan, unit usaha Pertanian, dan unit usaha Peternakan. Dimana pada unit usaha

pengkreditan terdapat UPK dan JALMAT yang pencatatannya juga terpisah. Kemudian pada unit usaha perdagangan pencatatan dipisah menjadi empat bidang usaha, yakni: perdagangan alat tulis, elpiji, dan galon; bidang *fotocopy*; sewa gedung, dan *BRILINK*.

Kemudian permasalahan kedua adalah pencatatan laporan keuangan di BUMDes Cakra Usaha masih manual. Selain itu pencatatan laporan keuangan yang masih secara manual dan hanya dikerjakan bendahara yang juga membuat pencatatan setiap unit di BUMDes. Sehingga proses pembuatan laporan keuangan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Namun dalam Praktik Pengalaman Lapangan ini penulis berfokus pada permasalahan pertama mengenai pelaporan keuangan BUMDes yang hanya dikerjakan oleh bendahara. Karena urgensi dari permasalahan ini yang akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan di BUMDes Cakra Usaha.

D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik

Berdasarkan permasalahan yang ada di BUMDes Cakra Usaha dalam pencatatan dan pembuatan laporan keuangan yang masih menggunakan pencatatan manual, pihak BUMDes memberi tanggapan bahwa akan BUMDes dibuatkan aplikasi pencatatan untuk BUMDes Cakra Usaha. Hal ini setelah berdiskusi dan meminta saran kepala desa Tapan selaku penasehat BUMDes. Aplikasi pencatatan ini sedang dalam proses pengerjaan, karena baru direalisasikan pada bulan Juni 2021. Dengan aplikasi pihak pengelola BUMDes berharap dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pembuatan laporan keuangan BUMDes.

Permasalahan lain yang dihadapi BUMDes yakni pembukuan dan pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh satu orang yaitu bendahara BUMDes. Pihak BUMDes menanggapi bahwa dimungkinkan penambahan jumlah karyawan di bidang akuntansi. Namun hal ini juga masih dalam tahap pertimbangan, karena pihak BUMDes dan Kepala Desa Tapan mempertimbangkan kemampuan BUMDes dalam mengelola keuangan BUMDes. Untuk kondisi saat ini, bendahara selaku pelaksana

pencatatan dan pembuatan laporan keuangan mengusahakan semaksimal mungkin untuk melakukan pembuatan laporan keuangan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kualitas Pelaporan Keuangan

1. Pengertian Kualitas Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan yang nantinya akan dipakai untuk pelaporan kegiatan organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan. Pelaporan ini dimaksudkan sebagai suatu pertanggungjawaban dan digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan bagi pemakainya. Pelaporan informasi keuangan merupakan suatu informasi ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan bisnis yang diumumkan ke publik untuk membantu para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif (Yadiati dan Mubarak,2017).⁷

Secara keseluruhan pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan atau organisasi menilai kualitas pelaporan keuangan sebagai hal yang sangat penting. Kualitas pelaporan keuangan diartikan sebagai penyampaian informasi operasi perusahaan mengenai akurasi pelaporan keuangan, terutama arus kas yang diharapkan dapat memberi informasi pada investor terkait ekuitas (Biddle,et.al, 2009).⁸ Sedangkan pendapat lain mengenai kualitas pelaporan keuangan bahwa suatu perusahaan yang membuat kebijakan tinggi mengenai kualitas pelaporan keuangan akan meminimalisir asimetri informasi (Handayani, 2016).⁹ Dalam laporan keuangan semakin tinggi kualitas pelaporan keuangan, informasi perusahaan

⁷ Winwin Yadiati dan Abdulloh Mubarak, *Kualitas Pelaporan Keuangan: Kajian teoritis dan Empiris*, (Jakarta:Kencana, 2017). Hal. 12.

⁸ Biddle,dkk, *How Does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency?*, *Journal of Accounting and Economics*. Vol. 48 No.2-3, 2009. Hal. 115.

⁹ Ulum Tri Handayani, Sylvia Veronica Siregar, dan Elok Tresnaningsih, *Kualitas Pelaporan Keuangan, Mekanisme Governance, dan Efisiensi Investasi*, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 7, No.2, 2016. Hal. 270-271.

akan semakin digambarkan dengan baik. Sehingga akan semakin kecil asimetri informasi dan dari keadaan ini akan membantu lebih efisiennya pengambilan keputusan investasi suatu perusahaan atau organisasi.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan memiliki tujuan utama yakni menunjang para *stakeholder* untuk menentukan keputusan keuangan yang tepat dengan melakukan prediksi pada arus kas perusahaan dan lembaga (Sakti dan Septiani, 2015).¹⁰ Sedangkan tujuan lain dilakukan pelaporan keuangan antara lain:

- a. Pelaporan keuangan sebaiknya menyediakan informasi yang dibutuhkan *stakeholder* dalam membuat suatu keputusan investasi yang rasional. Informasi ini sebaik-baiknya mudah dipahami oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Selain itu informasi ini juga dapat dipahami dengan baik oleh pihak yang paham dalam bidang bisnis dan kegiatan ekonomi. Serta pihak yang memiliki kemauan dalam mempelajari informasi ini.
- b. Sebaik-baiknya pelaporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi pada perusahaan atau organisasi. Permintaan terhadap sumber daya tersebut adalah perusahaan diwajibkan untuk memindahkan sumber daya ke entitas lain, dan pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi yang menyebabkan pergantian sumber daya dan permintaan terhadap sumber daya.

B. Pengendalian Internal

1. Pengertian Pengendalian Internal

Istilah pengendalian internal banyak digunakan dalam internal control. Pengendalian internal salah satu sistem yang menolong pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Pengendalian internal

¹⁰ Alisya Misitama Sakti dan Aditya Septiani, *Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan dan Jatuh Tempo Utang Terhadap Efisiensi Investasi*, Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 4 No. 2, 2015,1-2.

diartikan sebagai prosedur yang dibentuk untuk memastikan mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang kredibilitas pelaporan keuangan, kesesuaian terhadap hukum dan peraturan yang sedang berlaku, dan efektivitas serta efisien aktivitas operasi (Arens dan James, 2006).¹¹ Sama dengan menurut Haryono pengendalian internal adalah:¹²

“suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen dan personil lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut: keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan efektivitas dan efisiensi operasi.”

Pengertian lain tentang pengendalian internal merupakan keseluruhan agenda operasional, metode dan pengukuran suatu kegiatan usaha yang dilakukan pemilihan untuk menyelamatkan harta, memeriksa ketepatan dan keandalan data akuntansi tersebut, menambah efisiensi operasional dan mendukung kepatuhan pelaksanaan kebijakan manajerial yang ditetapkan (Diana dan Lilis, 2011).¹³ Hartanto (2008) memberikan pendapat berbeda terkait “pengendalian internal yang disamakan dengan internal cek yang merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian dari tata administrasi”.¹⁴ Internal cek adalah teknik untuk melakukan pengecekan data akuntansi yang dilakukan dengan memberikan pembeda fungsi antara karyawan yang menangani suatu transaksi, misalnya antara tugas pencatatan unit usaha perdagangan di BUMDes dengan tugas karyawan bagian pembuatan laporan keuangan induk BUMDes. Hal ini dilakukan jika di suatu saat dilakukan perbandingan untuk mengetahui jumlah jam kerja serta gaji yang diakui.

¹¹ Alvin Arens dan James, *Auditing Edisi Indonesia*, Terj. Amir Abadi Yusuf, (Jakarta: Salemba Empat, 2006). Hal. 412.

¹² Jusup Al Haryono, *Auditing*, (Yogyakarta: BP STIE, 2001), hal. 252.

¹³ Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Sistem Informasi Akuntansi, perancangan, prosedur dan penerapan*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2011). Hal. 82.

¹⁴ D. Hartanto, *Akuntansi Untuk Usahawan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 2008). Hal. 51.

2. Prosedur dan Tujuan Pengendalian Internal

Suatu organisasi yang efisien dalam pengendaliannya pada dasarnya terdapat pada manajemennya. Jika top manajemen menganggap pengendalian internal sebagai sebuah keharusan maka dimungkinkan akan tercapai tujuan pengendalian internal yang efektif. Menurut M. Guy (2002) terdapat prosedur pengendalian internal yang dibuat top manajemen untuk mencapai tujuan yang diinginkan, antara lain:¹⁵

- a. Pembagian tugas yang jelas
- b. Prosedur persetujuan yang jelas
- c. Dokumen dan catatan yang cukup memadai
- d. Pemeriksaan pelaksanaan kerja yang terpisah.

Pengendalian internal memiliki beberapa tujuan antara lain:

- a. Menjaga kekayaan perusahaan
 - 1) Pengguna kekayaan organisasi melalui sistem otorisasi yang sudah ditentukan
 - 2) Pertanggungjawaban kekayaan yang dicatat dilakukan perbandingan dengan kekayaan yang dimiliki sesungguhnya
- b. Memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi
 - 2) Pelaksana transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditentukan
 - 3) Dilakukan pencatatan transaksi yang telah terjadi dalam catatan akuntansi.

3. Unsur-unsur Pengendalian Internal

Unsur dalam pengendalian internal (Mulyadi,2016) meliputi:¹⁶

- a) Struktur organisasi yang memisahkan secara tegas tanggung jawab fungsional

¹⁵ Dan M.Guy,dkk, *Auditing*, (Jakarta: Erlangga, ed. 5, 2002), jilid I, hal. 226.

¹⁶ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, ed. 4,2016), Hal. 130.

Struktur organisasi merupakan *framework* membagi tanggungjawab fungsional kepada unit-unit dalam organisasi untuk melakukan pelaksanaan kegiatan wajib perusahaan. Untuk melaksanakan kegiatan wajib ini dibentuk suatu departemen yang nantinya akan dibagi kembali menjadi unit-unit yang lebih kecil dalam organisasi untuk melaksanakan aktivitas organisasi. Dasar pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi sebagai berikut:

1. Harus dipisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi organisasi.

Fungsi operasi adalah wewenang yang dimiliki untuk melaksanakan suatu kegiatan. Setiap aktivitas dalam perusahaan membutuhkan persetujuan manajer yang memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan. Sedangkan fungsi penyimpanan merupakan fungsi yang memiliki kewenangan untuk menyimpan aset perusahaan.

2. Suatu fungsi tidak boleh diberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan berbagai tahap suatu transaksi.

- b) Sistem otoritas dan prosedur pencatatan yang melindungi dengan baik aset, utang, pendapatan, dan beban.

Setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan hanya akan terjadi atas dasar persetujuan dari petinggi yang memiliki kewenangan untuk menyetujui transaksi tersebut. Sehingga, harus ada sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk persetujuan atas terjadinya suatu transaksi.

- c) Praktik yang sehat dalam menangani tugas dan fungsi setiap unit dalam organisasi.

Pembagian tanggung jawab fungsional, sistem pemberian wewenang, dan prosedur pencatatan yang telah diresmikan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak diimbangi dengan

terciptanya prosedur-prosedur yang menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

- d) Karyawan yang kompetensi dan kualitasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Sebaik apapun struktur dalam organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur dalam pencatatan, serta berbagai prosedur untuk menjamin praktik yang sehat tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kualitas karyawan yang melaksanakan tugas. Sebaiknya pimpinan mengadakan analisis terhadap posisi karyawan dan syarat yang dibutuhkan, posisi tersebut dibuatkan laporan untuk program pelatihan dan menerapkan sistem penilaian prestasi yang dicapai karyawan.

4. Prinsip-Prinsip Pengendalian Internal

Suatu sistem harus terpenuhinya prinsip-prinsip pengendalian internal untuk mencapai tujuan pengendalian, sehingga menurut Hartadi (1987) ada enam prinsip dasar pengendalian internal antara lain:¹⁷

- a. Pemisahan fungsi

Pemisahan fungsi dilakukan untuk menghindari dan memberikan pengawasan sehingga akan segera tanggap terhadap kesalahan. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar suatu pelaksanaan tugas terlaksana secara efisien.

- b. Prosedur pendelegasian kewenangan

Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin transaksi telah disetujui oleh orang yang memiliki kewenangan.

- c. Prosedur dokumentasi

Untuk menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif sangat penting untuk terdapat dokumen layak. Dokumen

¹⁷ Bambang Hartadi, *Auditing Suatu Pedoman Pemeriksa Akuntansi*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1987). Hal. 130.

mendasari pemberian tanggung jawab untuk melaksanakan dan pencatatan akuntansi.

d. Prosedur dan pencatatan akuntansi

Pengendalian ini dilakukan untuk menyiapkan catatan akuntansi yang nantinya akan diperiksa secara cepat dan data akuntansi akan dapat dilaporkan kepada pihak pengguna informasi akuntansi tepat waktu.

e. Pengawasan fisik

Pengawasan fisik berhubungan dengan pemakaian alat-alat mekanisme dan elektronik dalam penyelenggaraan dan pencatatan semua transaksi.

f. Pemeriksaan internal secara bebas

Pemeriksaan ini berhubungan dengan perbandingan antara aset yang dicatat dan aset sesungguhnya, melaksanakan rekening-rekening kontrol dan melakukan perhitungan ulang gaji karyawan. Hal ini dilakukan untuk mengawasi kebenaran data.

5. Keterbatasan Pengendalian Internal

Pengendalian internal dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang cukup bagi para manajemen berhubungan dengan usaha dalam organisasi. Sebaik apapun operasi pengendalian internal tetap saja memiliki keterbatasan-keterbatasan. Menurut Mulyadi (2002) keterbatasan yang dilakukan bawahan yang sering terjadi pada setiap pengendalian internal sebagai berikut:¹⁸

- a. Kesalahan dalam mempertimbangkan sesuatu, kesalahan ini sering terjadi saat manajemen dan personel lain sedang mempertimbangkan suatu keputusan yang akan diambil atau saat mempertimbangkan sesuatu dalam melaksanakan tugas rutin. Kesalahan ini terjadi akibat kurang memadainya informasi yang dimiliki, adanya tenggat waktu atau tekanan lainnya.

¹⁸ Mulyadi, *Auditing*, (Jakarta: Salemba Empat, ed. 6, 2002). Hal. 81.

- b. Gangguan, dalam pengendalian internal personel dapat melakukan kesalahan memahami instruksi pemimpin atau membuat kesalahan berupa kelalaian tugas, tidak adanya perhatian, atau bisa disebabkan personel mengalami kelelahan. Pergantian sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem serta prosedur juga dapat mengakibatkan terjadinya gangguan.
- c. Kolusi merupakan tindakan dengan maksud berbuat kejahatan yang dilakukan beberapa individu. Kolusi menyebabkan pengendalian internal yang dibuat untuk melindungi aset entitas akan kebobolan dan tidak terdeteksinya kejahatan oleh pengendalian internal yang telah dirancang.
- d. Pengabaian oleh manajemen, manajemen dapat mengacuhkan kebijakan dan prosedur yang terdapat pada perusahaan dengan maksud curang seperti mengambil keuntungan pribadi, melakukan penyajian keuangan yang berlebihan atau melakukan kepatuhan buatan.
- e. Biaya melebihi manfaat, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengendalian internal tidak boleh lebih dari manfaat yang diharapkan dari adanya pengendalian internal. Biaya tidak diperbolehkan melebihi manfaat karena pengukuran manfaat maupun biaya tidak mungkin dilakukan secara tepat. Manajemen perusahaan harus memperkirakan secara tepat dalam mengevaluasi biaya serta manfaat dalam pengendalian internal.

C. Analisis Temuan Studi

1. Unit-Unit Usaha BUMDes Cakra Usaha

Di dalam BUMDes Cakra Usaha terdapat empat unit usaha antara lain:

a. Unit Usaha Perkreditan

Unit usaha Perkreditan dalam BUMDes Cakra Usaha terbagi menjadi dua macam perkreditan yakni UPK dan JALMAT (Jalinan Mitra). Unit ini dimaksudkan untuk memberikan pinjaman modal yang berfungsi untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa. Pinjaman ini diberikan kepada masyarakat golongan menengah ke bawah atau masyarakat desa yang memiliki usaha dalam skala mikro. Perbedaan unit perkreditan UPK dan JALMAT adalah peminjamnya. Unit UPK diperuntukan bagi masyarakat desa yang ingin meminjam secara perorangan. Jumlah pinjaman berkisar antara Rp500.000 sampai dengan Rp1.000.000. Sedangkan unit JALMAT diperuntukan kepada kelompok usaha yang ingin meminjam secara kelompok, contohnya kelompok usaha tani. Pada unit usaha perkreditan UPK besaran bunga 1,5% dari jumlah pinjaman. Sedangkan untuk JALMAT besaran bunga 1% dari jumlah pinjaman. Jangka waktu pembayaran pinjamannya umumnya sekitar 10 bulan.

b. Unit Usaha Perdagangan

Pada unit usaha perdagangan memiliki beberapa usaha dan dibagi menjadi beberapa usaha antara lain: usaha perdagangan, *fotocopy*, sewa gedung, dan BRILink. Pada unit usaha perdagangan menyediakan berbagai alat tulis kantor, elpiji 3 kg, galon, berbagai minuman dingin, dan bahan lain yang tidak ditemui di toko sekitar BUMDes Cakra Usaha. Usaha perdagangan dilakukan dengan tujuan sebagai penyeimbang harga, sehingga harga tersebut dapat terjangkau oleh

masyarakat di desa Tapan. Selanjutnya untuk usaha sewa gedung adalah unit penyewaan gor, tempat usaha di pelataran balai desa Tapan, dan pertokoan. Gor desa Tapan umumnya di sewa untuk permainan badminton dan voli. Untuk menyewa gor desa Tapan selama satu jam dikenakan biaya sebesar Rp45.000. Sedangkan untuk menyewa toko selama setahun di kenakan biaya sewa sebesar Rp3.000.000. Usaha *fotocopy* dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah desa, para pelajar, dan masyarakat umum untuk mendapatkan layanan penggandaan dokumen. Selain itu lokasi usaha fotocopy berada di depan kantor balai desa Tapan. Sehingga akan memudahkan masyarakat yang ingin menggandakan dokumen untuk keperluan di pemerintah desa. Jasa BRIlink merupakan perluasan dari layanan BRI bagi masyarakat pedesaan yang membutuhkan layanan pembayaran rekening listrik, rekening telepon, angsuran kredit, penarikan tunai, pembayaran BPJS, dan melakukan *top up E-money*.

c. Unit Usaha Pertanian

Unit usaha pertanian merupakan kerjasama dalam bentuk kemitraan antara pihak BUMDes Cakra Usaha dengan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani). Usaha ini bergerak di bidang penjualan pupuk bersubsidi. BUMDes berperan sebagai pengelola dan tempat penyimpanan pupuk. Pembagian keuntungan dari kemitraan penjualan pupuk sebesar 40% untuk BUMDes, 30% untuk GAPOKTAN, dan sisanya 30% untuk pengurus.

d. Unit Usaha Perikanan

Unit usaha perikanan adalah kerjasama antara BUMDes dan para pembudidaya ikan. Kerjasama dilakukan dengan pembudidaya ikan yang telah mendapatkan pinjaman kredit lunak dari BUMDes Cakra Usaha. Unit usaha ini adalah

penjualan pakan ikan lele dan ikan gurami. Pembagian keuntungan didasarkan pada sistem bagi hasil.

2. Tugas-Tugas Pencatatan Akuntansi pada Unit-Unit di BUMDes

Cakra Usaha

a. Unit usaha Perdagangan

Dalam unit usaha perdagangan terdapat empat jenis usaha yang pencatatan dan masing-masing jenis usaha dipisahkan pencatatannya. Jenis usaha pertama yakni usaha perdagangan. Dalam usaha perdagangan pencatatannya meliputi jurnal umum untuk pencatatan transaksi harian, pembelian barang dagang, dan pencatatan persediaan barang. Dalam pencatatan persediaan barang dilakukan secara manual dengan menghitung sisa persediaan setiap harinya. Jenis usaha yang kedua adalah usaha *fotocopy*. Dalam usaha *fotocopy* pencatatan yang dilakukan meliputi pencatatan jurnal umum untuk pencatatan transaksi harian, dan persediaan kertas HVS. Jenis usaha ketiga adalah penyewaan gor, toko, dan tempat usaha di pelataran BUMDes. Dalam usaha penyewaan pencatatan yang dilakukan adalah jurnal umum untuk mencatat transaksi setiap harinya. Jenis usaha keempat adalah BRILink, pencatatan yang dilakukan adalah jurnal umum untuk pencatatan transaksi harian.

b. Unit usaha Perkreditan

Dalam unit usaha perkreditan terdapat dua jenis pinjaman yakni UPK dan JALMAT yang pencatatannya dilakukan secara terpisah. Dalam pencatatan perkreditan dibagi menjadi 2 buku dan kemudian disebut dengan buku 1 dan buku 2. Dalam buku 1 tentang pencatatan jurnal umum transaksi selama sebulan meliputi pendapatan pokok, jumlah bunga dari pinjaman, tabungan, dan pencairan dana pinjaman. Sedangkan untuk buku 2 tentang pencatatan laporan laba rugi bulan bersangkutan yang meliputi pencatatan pendapatan dan biaya. Pencatatan diluar kedua buku

diatas antara daftar nama peminjam beserta jumlah pinjaman pokok, jumlah bunga, dan angsuran/pelunasan setiap bulan dan daftar nama peminjam yang dipisahkan ke dalam rekening-rekening tersendiri untuk setiap nama peminjam. Pencatatan lain diluar kedua buku tersebut adalah piutang lancar, daftar nama peminjam dan piutang tidak lancar, daftar nama peminjam dan piutang tidak tertagih.

c. Unit Usaha Pertanian

Pada unit usaha pertanian yang bergerak di bidang kemitraan penjualan pupuk, pencatatan yang dilakukan adalah pencatatan jurnal umum untuk transaksi harian dan persediaan pupuk.

d. Unit Usaha Perikanan

Pada unit usaha perikanan di bidang kerjasama penjualan pakan ikan lele dan ikan gurami, pencatatan yang dilakukan meliputi pencatatan jurnal umum untuk transaksi harian, persediaan pakan, dan pakan *expired*.

3. Tugas dan Tanggungjawab Bendahara BUMDes

Umumnya bendahara dalam suatu Badan Usaha Milik Desa bertugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha BUMDes. Pada BUMDes Cakra Usaha bendahara memiliki tugas antara lain: melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa, membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulannya, membuat laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes setiap bulannya, dan sebagai pengendali laporan keuangan. Namun berdasarkan temuan di lapangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cakra Usaha, bendahara tidak hanya membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes, tetapi juga melakukan pencatatan harian pada tiga unit usaha kecuali unit perkreditan. Pencatatan unit perkreditan dilakukan oleh ketua unit

perkreditan, namun pembuatan laporan keuangan menjadi tanggung jawab bendahara. Sehingga bendahara bertanggung jawab membuat pencatatan harian pada unit usaha perdagangan, unit usaha perikanan, dan unit usaha pertanian. Hal ini menyebabkan bendahara BUMDes Cakra Usaha menemui kesulitan dalam mengerjakan berbagai tugas tersebut dan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Selain itu bendahara BUMDes juga menjadi pelaksana unit usaha perdagangan. Tugas menjadi pelaksana unit usaha perdagangan dilakukan bergantian dengan sekretaris BUMDes dan ketua unit perkreditan.

Permasalahan yang terjadi pada BUMDes Cakra Usaha ini tidak sejalan dengan teori pengendalian internal. Dimana pengendalian internal dimaksudkan sebagai prosedur yang dibentuk untuk memastikan mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang kredibilitas pelaporan keuangan, kesesuaian terhadap hukum dan peraturan yang sedang berlaku, dan efektivitas serta efisien aktivitas operasi. Dalam prosedur pengendalian internal terdapat prosedur yang memberlakukan pembagian tugas secara jelas dan pemeriksaan pelaksanaan kerja yang terpisah. Sehingga tidak terjadi beban tugas yang berlebih. Hal ini juga senada pada unsur-unsur pengendalian internal. Dalam unsur pengendalian internal terdapat salah satu unsur yang menyatakan bahwa struktur organisasi yang secara tegas memisahkan tanggungjawab fungsional. Dasar pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi adalah harus dipisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi organisasi serta suatu fungsi tidak boleh diberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan berbagai tahap suatu transaksi. Permasalahan tersebut menyebabkan kualitas pelaporan keuangan tidak berjalan secara maksimal.

Bendahara BUMDes dalam menjalankan dan membuat pencatatan harian ketiga unit usaha pada BUMDes menemui permasalahan. Permasalahannya terkait penanganan dan perhitungan persediaan barang. Dalam BUMDes Cakra Usaha persediaan barang dihitung menggunakan cara manual dan belum menerapkan metode perhitungan

serta pencatatan persediaan. Untuk saat ini ketua dan bendahara BUMDes belum menemukan solusi untuk mengatasi masalah persediaan. Bendahara BUMDes mengetahui bagaimana cara pencatatan persediaan, namun untuk saat ini belum bisa menerapkan karena keterbatasan waktu.

C. Solusi Permasalahan

Untuk menangani permasalahan BUMDes Cakra Usaha terkait tanggung jawab berlebih yang dilakukan bendahara adalah dengan menambah jumlah karyawan pelaksana operasional untuk membantu melakukan pencatatan transaksi harian pada unit-unit usaha BUMDes. Hal ini mungkin untuk dilakukan karena dalam peraturan desa Tapan No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat pasal mengenai anggota pelaksana operasional. Dijelaskan dalam pasal 15 ayat 1 bahwa “dalam melaksanakan kewajiban pelaksana operasional dapat menunjuk Anggota Pelaksana Operasional sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha”.¹⁹ Hal ini didukung dengan peraturan desa Tapan No. 6 Tahun 2016 pasal 15 ayat 2 bahwa “pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya”.²⁰ Solusi lain yang dapat dilakukan dengan meminta setiap ketua unit membuat pencatatan harian BUMDes untuk meringankan beban dan tanggung jawab bendahara.

¹⁹ Peraturan Desa Tapan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Pasal 15 ayat 1.

²⁰ Ibid, Pasal 15 ayat 2.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

BUMDes merupakan pendekatan baru yang dilakukan pemerintah pusat untuk mampu menggerakkan dan merangsang perekonomian di pedesaan yang dikembangkan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pembentukan BUMDes didirikan dengan tujuan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang membuka usaha, menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa, untuk mengembangkan desa, dan meningkatkan jumlah pendapatan desa. Jika BUMDes dikelola dengan baik, maka desa akan secara mandiri membiayai pembangunan desa dan desa mampu mengentaskan kemiskinan dengan memberikan wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam BUMDes dibutuhkan tenaga kerja dalam pengelolaan dan pelaksana operasional BUMDes. Bendahara BUMDes memiliki beberapa tanggung jawab yang diemban selaku pembuat laporan keuangan dan pelaksana operasional. Dibutuhkan pengendalian internal yang memadai untuk memberikan tanggungjawab dan pemisahan tugas yang jelas agar tidak terjadi beban berlebih. Beban kerja berlebih ini akan ikut mempengaruhi kualitas dari pelaporan keuangan yang dihasilkan. Diperlukan ketaatan terhadap berlakunya pengendalian internal dalam sebuah organisasi.

Umumnya bendahara dalam suatu Badan Usaha Milik Desa bertugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha BUMDes. Pada BUMDes Cakra Usaha bendahara memiliki tugas antara lain: melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa, membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan, membuat laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan, dan sebagai pengendali laporan keuangan. Penetapan beban kerja bendahara selaku pegawai bagian akuntansi yang

menemui permasalahan yaitu bendahara tidak hanya membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes, tetapi juga melakukan pencatatan harian pada unit-unit lain pada BUMDes kecuali unit perkreditan. Hal ini menyebabkan bendahara BUMDes Cakra Usaha menemui kesulitan dalam mengerjakan berbagai tugas tersebut dan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan teori pengendalian internal yaitu memberlakukan pembagian tugas secara jelas dan struktur organisasi yang secara tegas memisahkan tanggungjawab fungsional. Untuk menangani permasalahan BUMDes Cakra Usaha terkait tanggung jawab berlebih bendahara adalah dengan menambah jumlah karyawan pelaksana operasional untuk membantu melakukan pencatatan transaksi harian pada unit-unit usaha BUMDes. Selain itu juga dapat dilakukan dengan meminta setiap ketua unit membuat pencatatan harian BUMDes untuk meringankan beban tanggung jawab bendahara.

B. Saran

1. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai pengelola kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan diharapkan dapat menjalin hubungan silaturahmi secara baik dengan BUMDes Cakra Usaha Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung selaku tempat pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Diharapkan dapat terjalin hubungan kerjasama yang berkelanjutan, sehingga BUMDes Cakra Usaha berkenaan menerima mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan Selanjutnya.

2. Untuk BUMDes Cakra Usaha

Penulis berharap agar BUMDes Cakra Usaha kedepannya akan lebih baik dalam melakukan penetapan tenaga di bidang akuntansi. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Sehingga pelaporan keuangan berguna dalam membuat suatu keputusan investasi yang rasional yang dibutuhkan *stakeholder*.

3. Untuk Mahasiswa

Untuk mahasiswa sebagai peserta Praktik Pengalaman Lapangan diharapkan lebih mampu mengembangkan ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan dapat menerapkan ilmu yang di dapat pada praktik di lapangan. Selain itu, mahasiswa dapat menggali informasi secara mendalam selama kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan untuk mempersiapkan diri dalam praktik di lapangan dalam dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin dan James. (1993). *Auditing Edisi Indonesia*. Amir Abadi Yusuf. (2006). Jakarta: Salemba Empat.
- Biddle,dkk. (2009). “How Does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency?”. *Journal of Accounting and Economics*, 48(2-3):115, diakses 2 Agustus 2021.
- Bintarto, R. (2010). *Desa Kota*. Bandung: Alumni.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi, perancangan, prosedur dan penerapan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. (2014). “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”. *Journal of Rural and Development*, 5(1):2, diakses 2 Agustus 2021.
- Djojohadikusumo, Sumitro. (1985). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Guy, Dan M.,dkk. (2002). *Auditing edisi ke 5 jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Handayani, Ulum Tri, Sylvia Veronica Siregar, dan Elok Tresnaningsih. (2016). “Kualitas Pelaporan Keuangan, Mekanisme Governance, dan Efisiensi Investasi”. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2):270-271, diakses 2 Agustus 2021.
- Hartanto, D. (2008). *Akuntansi Untuk Usahawan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Hartadi, Bambang. (1987). *Auditing Suatu Pedoman Pemeriksa Akuntansi*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta
- Haryono, Jusup Al. (2001). *Auditing*. Yogyakarta: BPSTIE.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*. Jakarta: PT. Buku Seru.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi edisi ke 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2002). *Auditing edisi ke 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurlan, D. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (edisi ke 1)*. Jakarta: PT. Indeks.

- Sakti, Alisy Misitama dan Aditya Septiani. (2015). “Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan dan Jatuh Tempo Utang Terhadap Efisiensi Investasi”. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2):1-2, diakses 2 Agustus 2021.
- Peraturan Desa Tapan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 15 ayat 1.
- Wiley. (2015). *Level II CFA Study Guide*. New Jersey: John Wiley and Sons Inc.
- Yadiati, Winwin dan Abdulloh Mubarak. (2017). *Kualitas Pelaporan Keuangan: Kajian teoritis dan Empiris*. Jakarta:Kencana.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
AKUNTANSI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

BERITA ACARA
HARIAN PPL
JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN
TULUNGAGUNG
GELOMBANG II TAHUN 2021

Pada tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021, bertempat di Lembaga BUMDes Cakra Usaha, telah dilaksanakan PPL Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung gelombang II Tahun 2021 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Nadila Hananingrum
 NIM : 12403183218
 Jurusan : Akuntansi Syariah

NO	HARI/TANGGAL	PUKUL	URAIAN KEGIATAN
1.	Senin, 12 Juli 2021	09.00	Mencari referensi-referensi mengenai kegiatan PPL
2.	Selasa, 13 Juli 2021	08.30	Mengikuti pendalaman dan pembukaan PPL
3.	Rabu, 14 Juli 2021	10.00	Membuat review materi pendalaman
4.	Kamis, 15 Juli 2021	08.00	Membuat review materi pendalaman
5.	Jum'at, 16 Juli 2021	08.30	Mencari referensi untuk mencari permasalahan terkait judul
6.	Sabtu, 17 Juli 2021	09.00	Mencari referensi mengenai teknik pengambilan video dan teknik editing
7.	Minggu, 18 Juli 2021	09.15	Tatap muka melalui zoom dengan dpl untuk pengarahan kegiatan PPL

8.	Senin, 19 Juli 2021	15.00	Membuat laporan dimulai dengan cover, halaman persetujuan, dan latar belakang
9.	Selasa, 20 Juli 2021	11.00	Membuat daftar pertanyaan
10.	Rabu, 21 Juli 2021	11.00	Melakukan observasi dan wawancara dengan Ketua BUMDes
11.	Kamis, 22 Juli 2021	10.00	Mengolah informasi dari hasil wawancara
12.	Jum'at, 23 Juli 2021	09.00	Melakukan dokumentasi pengambilan video ke BUMDes
13.	Sabtu, 24 Juli 2021	13.00	Menyusun profil BUMDes Cakra Usaha
14.	Minggu, 25 Juli 2021	16.00	Menyiapkan daftar pertanyaan untuk menggali permasalahan lebih dalam
15.	Senin, 26 Juli 2021	11.00	Melakukan observasi dan membuat janji dengan Bendahara BUMDes untuk melakukan wawancara besok
16.	Selasa, 27 Juli 2021	09.00	Melakukan wawancara dengan bendahara BUMDes
17.	Rabu, 28 Juli 2021	08.00	Mengolah informasi dari hasil wawancara
18.	Kamis, 29 Juli 2021	06.30	Mengajukan dan konsultasi mengenai judul
19.	Jum'at, 30 Juli 2021	08.00	Melanjutkan membuat laporan bab 1
20.	Sabtu, 31 Juli 2021	15.00	Mengolah informasi dari hasil wawancara
21.	Minggu, 1 Agustus 2021	14.00	Melanjutkan membuat laporan bab 2
22.	Senin, 2 Agustus 2021	15.00	Mencari referensi mengenai teori yang digunakan

23.	Selasa, 3 Agustus 2021	13.45	Konsultasi dengan DPL mengenai pembahasan bab 3
24.	Rabu, 4 Agustus 2021	10.00	Melakukan wawancara dengan bendahara dan ketua unit perkreditan BUMDes
25.	Kamis, 5 Agustus 2021	19.00	Melanjutkan membuat laporan bab 3
26.	Jum'at, 6 Agustus 2021	10.00	Melanjutkan membuat laporan bab 3
27.	Sabtu, 7 Agustus 2021	13.00	Melanjutkan membuat laporan bab 4 dan memasukkan lampiran
28.	Minggu, 8 Agustus 2021	08.30	Mulai mengerjakan pembuatan essay
29.	Senin, 9 Agustus 2021	13.00	Mengerjakan pembuatan essay
30.	Selasa, 10 Agustus 2021	10.30	Mengedit video yang telah diambil
31.	Rabu, 11 Agustus 2021	07.30	Mengedit video yang telah diambil dan tahap <i>finishing</i>
32.	Kamis, 12 Agustus 2021	09.30	Mengerjakan pembuatan essay
33.	Jum'at, 13 Agustus 2021	11.00	Upload video di youtube

Tulungagung, 13 Agustus 2021







Nadila Hananingrum

NIM. 12403183218

BERITA ACARA KONSULTASI

Nama: Nadila Hananingrum
NIM: 12403183218
Jurusan: Akuntansi Syariah
DPL: Sri Dwi Estiningrum, S.E., Ak., MM., C.A.
Tempat PPL: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cakra Usaha Desa Tapan
Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
Judul Laporan: Penetapan Tenaga Kerja Di Bidang Akuntansi Dalam
Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Di Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) Cakra Usaha Desa Tapan Kecamatan
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

No	Hal Yang Dikonsultasikan	Catatan DPL	Paraf
1.	Pengarahan laporan PPL	Pengarahan bagaimana mencari judul dan permasalahan yang tepat dan menjelaskan teknis PPL serta mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan	
2.	Konsultasi mengenai judul laporan PPL yang diajukan	Merevisi terkait judul yang diajukan	
3.	Konsultasi mengenai isi dan hasil temuan laporan PPL	Mengarahkan analisis temuan studi dan menjelaskan tentang pembuatan essay	
4.	Pengajuan laporan PPL	Persetujuan laporan	

Tulungagung, 16 Agustus 2021

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan



Sri Dwi Estiningrum, S.E., Ak., M.M., C.A.

NIP. 19720908 200710 2 001

**FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN
LAPANGAN (PPL)**



Wawancara dengan Bendahara BUMDes Cakra Usaha



Wawancara dengan Ketua BUMDes Cakra Usaha



Wawancara dengan Ketua BUMDes Cakra Usaha



Wawancara dengan Bendahara dan Ketua Unit Perkreditan BUMDes Cakra Usaha



Kantor BUMDes dan tempat unit perdagangan



BUMDes Cakra Usaha



Kantor BUMDes Cakra Usaha

RESUME PEMBUKAAN DAN PEMBEKALAN PPL

Pemateri 1: Anang Mustofa, S.E.

Narasumber pertama adalah Bapak Anang Mustofa selaku kepala desa Kendalbulur, beliau selain menjadi kepala desa juga sekaligus menjadi seorang pengusaha. Materi yang disampaikan mengenai pengembangan potensi desa. Salah satu cara untuk meningkatkan kemajuan suatu desa adalah dengan meningkatkan jumlah para pemuda desa terutama pemuda yang baru saja menempuh bangku perkuliahan untuk mengetahui dan mengerti isu-isu maupun paradigma desa. Dengan banyak pemuda yang mulai mencintai desanya setelah menimba ilmu dari perguruan tinggi maka pemuda ini akan memiliki kesadaran untuk ikut bergerak dan berperan memajukan desa. Hal ini sesuai dengan visi-misi presiden yakni membangun Indonesia di mulai dari pinggiran. Pembangunan yang dimulai dari desa dapat dikatakan sebuah awalan untuk membangun negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Karena hal ini bapak Anang mencoba untuk memulai dengan membangun desa. Dengan menjadikan suatu desa menjadi maju akan memberikan dampak besar, salah satunya dengan menyerap tenaga kerja serta UMKM, sehingga secara tidak langsung kabupaten akan maju.

Terdapat paradigma baru yang berkembang yakni bagaimana memahami sebuah desa, banyak desa maju yang telah melakukan inovasi-inovasi. Inovasi ini berlandaskan Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014. Pada UU ini negara mengakui adanya azas rekognisi dan kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Sehingga berdasarkan UU tersebut kemandirian desa dalam mengelola rumah tangganya yang diakui oleh negara. Hal ini berbeda dengan kedudukan desa dahulu yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan kabupaten atau dapat dikatakan sebagai pelayan administrasi. Namun desa saat ini berada dalam wilayah kabupaten. Paradigma desa dahulu menjadikan desa sebagai obyek pembangunan, dimana setiap usulan desa harus mendapatkan rekomendasi dari kabupaten. Namun dengan UU desa baru dan dengan adanya dana desa maka desa menjadi subyek pembangunan. Desa juga dapat melakukan inovasi untuk memajukan wilayahnya, sehingga desa dapat mengelola rumah tangganya sendiri,

desa yang mengusulkan pembangunan wilayahnya, dan masyarakat desa dapat secara langsung mengawasi pembangunan desa.

Dalam pembangunan desa harus sesuai dengan kebijakan pemerintah nasional saat ini, ada empat sektor pembangunan desa yakni: meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan pelayanan publik di desa, penanggulangan kemiskinan, dan menjadikan masyarakat desa menjadi subyek pembangunan. Dalam tahap siklus perencanaan pembangunan, untuk menjadi desa yang baik diperlukan kepala desa yang baik dengan memiliki visi-misi yang jelas. Visi-misi ini berpengaruh terhadap kemajuan dan regulasi suatu desa. Visi-misi Bapak Anang saat mencalonkan diri menjadi kepala desa salah satunya adalah memprioritaskan pembangunan desa dengan konsep lapangan wisata dan selanjutnya pengelolaan serta pengembangannya dilakukan oleh BUMDes. Pak Anang berharap BUMDes memiliki tugas mengelola produktivitas usaha masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Tujuan visi-misi Pak Anang saat itu meningkatkan kapasitas BUMDes dalam mengelola badan usaha milik desa. Dahulu BUMDes hanya bertugas mengelola unit usaha simpan pinjam yang pada kenyataannya sering mengalami beberapa kendala, salah satunya terjadi kredit macet pada unit simpan pinjam. Maka pembangunan desa wisata Nangkula Park menjadi salah satu bisnis yang mendukung kemunculan UMKM di desa. Desa wisata yang dibangun ini juga memiliki profit yang tinggi. Selain itu desa Kendalbulur memiliki potensi demografi yakni letaknya strategis dan mudah dijangkau ke kota kabupaten, sehingga memudahkan akses menuju desa.

Prioritas kedua Bapak Anang adalah desa digital sebagai upaya peningkatan pelayanan warga. Desa diharapkan siap dengan digitalisasi, masyarakat saat ini khususnya masyarakat di wilayah Tulungagung setiap rumah pasti dapat mengakses internet. Latar belakang perlunya digitalisasi di desa adalah untuk mempermudah interaksi dan komunikasi dengan warga masyarakat. Masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan yang ada di desa, sehingga transparansi publik lebih mudah. Selain itu, latar belakang adanya desa digital adalah untuk mempercepat dan efisiensi dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Dengan desa digital proses pelayanan surat-menyurat dilakukan secara online dan nantinya surat tersebut akan diantarkan ke rumah warga. Latar belakang lain

perlu digitalisasi pada desa adalah pesatnya era revolusi industri 4.0. Visi membangun desa digital antara lain adalah digitalisasi administrasi, digitalisasi pelayanan, dan digitalisasi ekonomi serta interaksi sosial. Alasan desa Kendalbulur melakukan digitalisasi desa adalah letak desa Kendalbulur strategis yang dekat dari pusat kabupaten sehingga tidak ada kendala terkait jaringan internet. Kemudian lebih dari 200 warga di desa Kendalbulur sudah berlangganan internet, 99% warga sudah memiliki gadget, banyak tempat di desa Kendalbulur memiliki akses internet gratis, dan juga warga masyarakatnya sudah melek digital.

Digitalisasi yang sudah ada di desa Kendalbulur adalah Sistem Informasi Desa, website pemerintah desa dan BUMDes, Sistem Keuangan Desa, Desa pintar (aplikasi surat-menyurat), aplikasi pertanahan C, dan yang berbeda dan tidak dimiliki dari desa lain adalah aplikasi SempelDesa (berbasis web yang terintegrasi dengan android). SempelDesa sebagai publikasi, ruang interaksi warga dengan masyarakat, dan juga tata kelola sosial dan ekonomi. Di SempelDesa dapat diisi pulsa yang nantinya BUMDes akan mendapatkan laba dari setiap transaksi yang dilakukan masyarakat dari aplikasi tersebut. Di desa Kendalbulur terdapat program yang dananya berasal dari pendapatan BUMDes yang langsung dikembalikan ke masyarakat desa yakni SADEWA (Santunan dari Desa untuk Warga). Program SADEWA ini dengan melakukan subsidi di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, tabungan ibu hamil dan PBB. Pengurus BUMDes pada tataran pejabat penting seperti Ketua dan Sekretaris harus memiliki pendidikan minimal S1. Namun untuk tatanan pengurus manager ke bawah adalah warga desa yang memiliki kemauan dan kemampuan atau keahlian. Konsep BUMDes banyak wisata maju yang memberikan dampak tidak hanya Pendapatan Asli Daerah desa melainkan mengentaskan warga masyarakat dan sudah memunculkan UMKM baru.

Pemateri kedua: Haris Susianto, S.H., M.Si

Narasumber kedua adalah kepala dinas tenaga kerja kabupaten Blitar yakni bapak Haris Susianto, S.H., M.Si. Materi yang disampaikan seputar pengelolaan tenaga kerja di masa pandemi. Setiap orang membutuhkan pekerjaan, pekerjaan merupakan pilihan dimana kita bisa memilih bekerja sebagai karyawan di sebuah

kantor instansi swasta maupun pemerintah, bekerja sebagai wiraswasta atau juga berkerja di rumah sebagai wirausaha. Tenaga kerja mendapatkan perhatian penting negara dan ditertibkan regulasi tentang Pekerja Migran Indonesia yakni pada Undang-Undang No. 18 tahun 2017. Disini peran tenaga kerja sangat besar mulai dari pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Tenaga kerja memiliki isu strategis dan rencana strategis juga. Karena setiap kegiatan dan pembangunan dimulai dengan perencanaan dan selanjutnya pelaksanaan. Pelaksanaan inilah membutuhkan tenaga kerja. Jika ada beberapa investor masuk ke Indonesia dan mereka hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja dan pada akhirnya banyak penduduk yang masih pengangguran. Bapak Haris menyampaikan mengenai indikator Ketenagakerjaan di kabupaten Blitar tahun 2020, dimana penduduk di atas usia 15 tahun ada sebanyak 928.931 jiwa dan jumlah angkatan kerjanya hanya sekitar 657.595 jiwa. Namun jumlah penduduk yang sudah memiliki pekerjaan hanya 632.461 jiwa dan sisanya sekitar 25.135 jiwa penduduk masih menganggur. Kenaikan pengangguran setiap tahunnya menjadi isu strategis yang dialami secara Nasional. Pemerintah Indonesia berupaya bagaimana mengurangi angka pengangguran dan bagaimana cara untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Isu strategis ketenagakerjaan di kabupaten Blitar adalah kualitas kompetensi tenaga kerja yang perlu ditingkatkan. Disini dinas ketenagakerjaan kabupaten Blitar membuat berbagai macam pelatihan kompetensi dan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan dimaksudkan untuk menciptakan wirausaha baru dimulai dengan skala kecil yang tidak memerlukan banyak modal. Disini yang diperlukan untuk memulai usaha adalah tekad dan keterampilan. Isu selanjutnya adalah kualifikasi tenaga kerja masih banyak yang belum bisa diterima di Pasar Kerja, karena belum memiliki *skill* atau kemampuan yang di butuhkan di Pasar Kerj. Disnaker banyak melaksanakan atau menyelenggarakan bursa kerja di era sebelum pandemi dengan program mini dan reguler. Untuk program mini ini bursa kerja hanya melibatkan perusahaan penyedia pekerjaan sebatas wilayah Jawa Timur saja. Untuk yang progam reguler tingkatnya sudah melibatkan perusahaan penyedia pekerja secara Nasional. Disnaker juga bekerjasama dengan BKP yang ada di SMK untuk menyediakan bursa kerja di

berbagai SMK. Disnaker membantu dengan menjembatani lulusan SMK ini untuk bekerja sesuai niat, bakat, dan kecocokan. Disnaker disini membantu untuk mempertemukan antara perusahaan penyedia dengan para calon pekerja lulusan SMK ini.

Selanjutnya Disnaker sebagai unsur pelayanan perangkat daerah memiliki urusan di bidang ketenagakerjaan. Terdapat 20 pelayanan publik di dinas tenaga kerja pada masyarakat dan terselenggara secara gratis. Pelayanan publik yang pertama adalah Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja. Yang kedua adalah Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan perwakilan pekerja. Selanjutnya Pengesahan Peraturan Perusahaan, hal ini terkait dengan serikat pekerja. Dimana apabila terjadi permasalahan antara pekerja dan perusahaan terdapat regulasinya yakni peraturan perusahaan. Kemudian Pendaftaran Kegiatan Kerja Bersama, pada pelayanan publik ini dibuat kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. Selanjutnya adalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediator. Pelayanan selanjutnya Pelayanan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit; Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang dalam Pemborong Pekerja; Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan; Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh; Pencatatan Perjanjian Kerja dalam Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh; Penerbitan Kartu Pencari Kerja/Kartu AK-1/Kartu Kuning; Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus; Penerbitan Rekomendasi Kantor Cabang Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia; Rekomendasi Izin Tempat Penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia; Rekomendasi Pasport Calon Pekerja Migran Indonesia; Pelayanan Informasi Pasar Kerja; Rekomendasi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta berskala Provinsi Jawa Timur; Rekomendasi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta berskala kabupaten Blitar; serta Pelayanan Permohonan Infomasi Publik.

Terbitnya Undang-undang baru terkait Pekerja Migran Indonesia ada sedikit pergeseran, di Disnaker terdapat informasi rinci mengenai lowongan kerja di dalam negeri maupun luar negeri. Jika ingin mengetahui lowongan pekerjaan yang dapat di percaya kebenarannya dapat datang ke Dinas Tenaga Kerja. Disana nantinya akan diberikan informasi lowongan pekerjaan baik lowongan pekerjaan

di dalam negeri maupun lowongan pekerjaan di luar negeri. Pelatihan di dinas tenaga kerja kabupaten Blitar terdapat pelatihan kewirausahaan. Pada pelatihan ini memberi pendampingan pemasaran. Selain itu dinas tenaga kerja kabupaten Blitar juga menyediakan pelatihan berbasis kompetensi. Dimana pelatihan bagi pekerja yang ingin bekerja di suatu perusahaan. Disnaker juga mengurus terkait penempatan transmigrasi. Saat ini transmigrasi penduduk masih ada, dimana syaratnya untuk mengikuti transmigrasi adalah harus menikah dulu. Istilah transmigrasi saat ini diartikan bukan hanya seperti membuka permukiman baru di hutan. Terdapat sedikit kendala tenaga kerja di era pandemi yakni penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang diberhentikan; Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri melalui kegiatan bursa kerja juga tidak bisa dilaksanakan; Perusahaan merumahkan karyawannya, sehingga karyawan yang diberhentikan dari pekerjaannya akan mendapatkan bantuan sosial dari Disnaker; serta Penempatan Transmigrasi mengalami penundaan. Maka kegiatan yang dapat dilakukan oleh Disnaker di era pandemi adalah Pendataan Pekerja Migran Indonesia yang baru pulang dari luar negeri. Disini sebelumnya PMI di negara tempat berkerja sudah melewati berbagai macam tes namun pekerja bisa saja terkontaminasi virus covid-19 dalam perjalanan pulang, sehingga di perlukan pendataan ulang dan melakukan tes kembali; Kegiatan Disnaker melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan dan pemerintah desa setempat; Pendataan Karyawan Perusahaan terdampak Covid-19 untuk diusulkan mendapatkan bantuan sosial; Monitoring dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di kabupaten Blitar; Pelaksanaan Monet Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Swasta di kabupaten Blitar; serta Fasilitas dan pemberian informasi mengenai program Kartu Prakerja.

Perhatian dan kebijakan antisipasi kedepan yang dilakukan dinas ketenagakerjaan kabupaten Blitar adalah Penguatan Koordinasi dalam rangka pengawasan kepulangan PMI dari luar negeri; Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi intensitas Kontak Langsung (aplikasi job fair, aplikasi hubungan industrial); Monitoring dan Pembinaan kepada Perusahaan, PPTKIS, LPKS, BKK, TKA di kabupaten Blitar.

Bukti Mengikuti Pembekalan PPL:

